



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2026 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerjaini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2026 berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sesuai yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2043 yang ditetapkan dengan Visi: Gorontalo Maju Dan Sejahtera, dan Misi: 1) Memanfaatkan letak geografis dengan IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan, 2) Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia, 3) Peningkatan pendapatan masyarakat, 4) Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas, 5) Menjadikan “Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Gorontalo, Agustus 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan anak Provinsi gorontalo

dr. Yana Yanti Suleman. SH.MH. M.KM
NIP. 197001012000032010



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2026 adalah dokumen rencanatahunan yang mempunyai arti strategis dalam mendukung pelaksanaan Program tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Gorontalo.
2. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan acuan untuk mengusulkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2026.



Rencana Kerja DPPA 2026

Mengingat Renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alurpenyusunannya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Di Pasal 138 ayat 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dan perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD (Pasal 138)

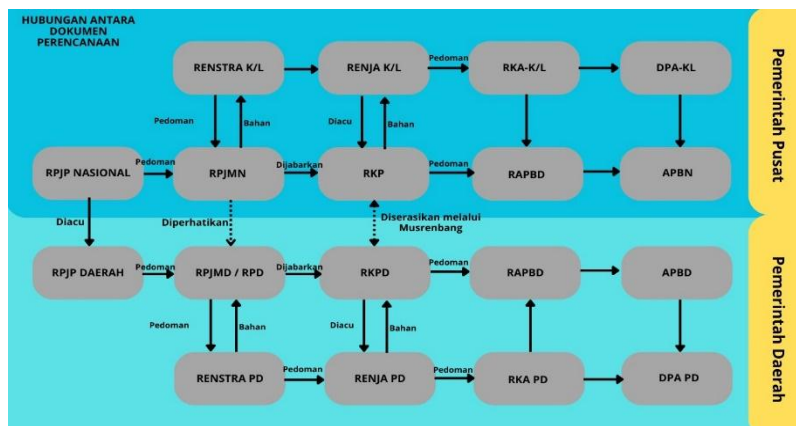
Adapun tahapan penyusunan dokumen Renja adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan Awal;
- c Penyusunan rancangan
- d Pelaksanaan Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e perumusan rancangan akhir hingga penetapan

Ada beberapa hal yang harus dipedomani dalam penyusunannya. Antara lain kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, sasaran dan prakiraan maju. Harus ada pula evaluasi hasil renja tahun lalu.



Rencana Kerja DPPA 2026



Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik dan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Rencana Kerja yang mempunyai arti strategis dalam pembangunan daerah, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 1 (satu) tahun ke depan.
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu perangkat dasar untuk tercapainya pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).





1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2026 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum sebagai berikut

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



Rencana Kerja DPPA 2026

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Rencana Kerja DPPA 2026

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021



Rencana Kerja DPPA 2026

Nomor 1419);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);
26. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Renca strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22).
27. Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah tahun 2023-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur nomor 69 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Program Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo untuk Tahun 2026.

Di samping itu rencana kerja Perangkat Daerah disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029,
2. Sebagai pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah,
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan



Rencana Kerja DPPA 2026

- penganggaran antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan,
4. Sebagai instrument dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini memberi ulasan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,



Rencana Kerja DPPA 2026

tujuan dan sasaran renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berisikan Program dan Kegiatan Dinas.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta rencana anggaran yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi yang dapat diidentifikasi dengan 2 hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan program/kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan program/kegiatan tersebut. Hasil evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2025. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berikutnya tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung, yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Wajib dan Belanja Langsung Urusan Pilihan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prpvinsi Gorontalo pada sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.





Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2025 Provinsi Gorontalo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Targ et Renj a (n- 2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat realisas i (%)		Real isasi Cap aian Prog ram dan Kegi atan s/d tahu n berj alan (n - 1)	Tingkat capaian Realisa si Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN									



Rencana Kerja DPPA 2026

	PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG dalam APBD	6,33 %							
		Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi	0,02 %							
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan ARG			25 OPD	25 OPD	100	25 OPD	33 OPD	132 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang dilatih PPRG			25 OPD	25 OPD	100	25 OPD	33 OPD	132 %
2.08.02.1.02	Perberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase (%) perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosisal, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) yang meningkat taraf ekonomikeluarga			50 org	34 Org	68	106 org	100	94,34 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang memperoleh penguatan	10 lembaga	10 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	100	7 lembaga	10 Lembaga	142.86 %



Rencana Kerja DPPA 2026

		<i>kapasitas</i>								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga pendukung prasyarat PUG yang difasilitasi (Pokja PUG, Gender Vocal Point, Sekber PUG, Lembaga Driver PUG (4 lembaga)	10 lembaga	10 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	100	7 lembaga	10	142.86 %
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga									
2.08.04.1.01	Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Dudi yang mendukung pembangjuran daerah urusan PPPA	34 DUDI	34 DUDI	25 DUDI	25 DUDI	100	44 DUDI	44	100 %
	Penyediaan Layanan Konrenhensif bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Dudi yang mendukung pembangjuran daerah urusan PPPA	34 DUDI	34 DUDI	25 DUDI	25 DUDI	100	44 DUDI	44	100 %
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak									
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersusunya data SIGA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1	100 %
	Penyediaan Data Gender Anak dan Provinsi	Jumlah dokumen SIGA yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1	100 %

Sumber: Kepmendagri, DPPPA Provinsi Gorontalo



Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo melaksanakan 6 program dan 19 kegiatan. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo cukup baik meskipun terdapat beberapa capaian kinerja dibawah target bahkan ada yang tidak tercapai, namun ada pula indikator yang capaian kinerjanya melampaui target.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Anak Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak belum memiliki tolak ukur yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja sesuai dengan pedoman yang ada yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK) . Hal ini disebabkan karena Dinas belum sepenuhnya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tolak ukur pelayanan kinerja.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut



Rencana Kerja DPPA 2026

Tabel 2.2

No	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata n Analisi s
				Tahu n 2021 (thn n-2)	Tahu n 2022 (thn n-1)	Tahu n 2024 (thn n)	Tahu n 2024 (thn n+1)	Tahu n 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thnn-1)	Tahu n 2024 (thn n)	Tahun 2024 thnn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah aparatur pemerintah daerah yangmeningkat pengetahuannya tentang (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) PPRG			25 org	25 org	100 org	0	25 org		100 org	0	
	Jumlah Dudi yang mendukung pembangunan daerah urusan PPPA			20 dudi	20 dudi	0	0	20 dudi		0	0	
	Jumlah dokumen SIGA yang tersedia			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
	Jumlah Kab/Kota layak anak			1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kot a	1 kab/kota	2 kab/kot a		1 kab/kota	1 kab/kota	
	Jumlah anak korban kekerasan yang terlayani			15 org	15 org	20 org	20 org	15 org		20 org	20 org	
	Jumlah Lembaga layanan perlindunganperempuan dan anak yang mendapat penguatan kapasitas			10 lembag a	10 lembag a	10 lembag a	10 Lembag a	10 lembag a		10 lembag a	10 lembaga	
	Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan edukasi pencegahan kekerasan terhadapperempuan			60 org	60 org	25 org	25 org	60 org		25 org	25 org	

Sumber: Kepmendagri, DPPPA Provinsi Gorontalo





Dari Tabel 2.2 dapat dilihat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang cukup baik meskipun terdapat beberapa capaian kinerja dibawah target bahkan ada yang tidak tercapai, namun ada pula indikator yang capaian kinerjanya melampaui target.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan , diskriminasi dan eksploitasi.

Perempuan merupakan salah satu sumber kekuatan dalam pembangunan. Perempuan yang memiliki kualitas dan daya saing yang baik tentunya akan produktif dan mampu berpartisipasi serta berkontribusi dalam pembangunan. Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna dalam pembangunan. Pemenuhan hak perempuan dicantumkan dengan jelas pada agenda SDG's, dari 17 goals dan 169 target dalam SDG's terdapat 16 goals dan 91 target yang terkait kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 sebesar 88,12 %. Capaian ini dibawah rata-rata nasional yang sudah pada angka 91,07 %. IPM 70,45 % masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional



Rencana Kerja DPPA 2026

71,29 %.

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo juga belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada September 2024 hanya sebesar 69.95 % dibandingkan laki-laki 72,9 %



Rencana Kerja DPPA 2026

Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016, namun tindak kekerasan masih terjadi, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 332 kasus kekerasan. Dari uraian diatas, maka itu isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan
- b. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo pada Tahun 2025.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo bertanggungjawab atas meningkatnya tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

Adapun pagu indikatif dalam Rancangan Awal RKPD 2025, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo memperoleh anggaran sebesar Rp. 9.229.217.841,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus empat puluh satu rupiah) .



Rencana Kerja DPPA 2026

untuk belanja langsung yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Melihat usulan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPD Provinsi Gorontalo dan usulan Rakortekbang Provinsi Gorontalo maka anggaran tersebut kurang memadai, karena belum mengakomodir untuk belanja kegiatan urusan penunjang pemerintahan oleh karenanya diharapkan ada penambahan pagu. sehingga target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dapat tercapai sesuai RPD Provinsi Gorontalo.

Perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :





Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025
Dapat dilihat pada lampiran



Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang, sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pada Tahun 2025 tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para stakeholders. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Disamping itu juga memperhatikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo terkait rencana pencapaian target RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026 serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini menyebabkan Daftar usulan stakeholder yang diakomodir dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel 2.5 berikut :





Rencana Kerja DPPA 2026



TABEL 2.5
T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Provins Gorontalo

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo

Adapun dengan kegiatan tersebut sebagai stimulan untuk pemberdayaan gender, memungkinkan pada tahun mendatang usulan kegiatan yang serupa guna meningkatkan peran perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat.	Kota Gorontalo	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi	110 Orang (jumlah peserta)	Unsur (partai politik, Organisasi Perempuan)



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA
4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, dengan
3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Peningkatan perlindungan hak perempuan
5. Peningkatan perlindungan khusus anak



Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo mendatang meliputi :

1. Peningkatan kualitas Perempuan dan anak.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

b. Sasaran.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo selang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
2. Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	87,23%
		Indeks Pemberdayaan Gender	67.90%
2	Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Perlindungan Anak	73.67%
3	Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD	Nilai SAKIP	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	CUKUP





Sumber: DPPA Provinsi Gorontalo

Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026, SDG's, pagu indikatif, lokasi kegiatan, SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Program :

1. Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang baik.
2. Terkelolanya urusan kepegawaian, keuangan dan penataan organisasi serta pengelolaan barang milik daerah secara baik.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar





Realisasi Kinerja SKPD

(4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- (2) Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian /Verivifikasi KeuanganSKPD
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas danFungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- (4) Penyediaan bahan logistik kantor
- (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (6) Penyediaan Bahan/Material
- (7) Fasilitas Kunjungan Tamu
- (8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- (1) Pengadaan Meubel
- (2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (1) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran Program :

- Meningkatnya kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG pada perangkat daerah.
- Meningkatnya kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, sosial dan politik

Indikator Program :



- Persentase anggaran responsive gender dalam APBD
- Persentase perempuan miskin yang menjadi pelaku usaha ultra mikro
- Persentase perempuan korban kekerasan yang menjadi pelaku usaha ultra mikro
- Persentase Perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan
- Persentase perangkat daerah yang memiliki perempuan sebagai Agen Perubahan Lingkungan yang Responsif Gender
- Persentase Perempuan Rentan yang berdaya secara sosial.
- Kegiatan :
 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan :
 - (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
 - (2) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - (3) Kewenangan Provinsi
 2. Perberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan :
 - (1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - (2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan



Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

C. Program Perlindungan Perempuan

Sasaran Program :

Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO

Indikator Program :

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Kegiatan :

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

D. Program Peningkatan Kualitas keluarga

Sasaran Program :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Indikator Program :

- Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang memperoleh penguatan dan pengembangan

Kegiatan :

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan



Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Sasaran Program:

- Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penyediaan datagender dan anak

Indikator Kegiatan :

- Jumlah perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak

Kegiatan :

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Sasaran Program :

- Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak
- Meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak

Indikator Kinerja

- Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar
- Persentase Kabupaten/kota dengan peringkat KLA



- Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan anggaran responsive anak Kegiatan :

Pelembagaan PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

G. Program Perlindungan Khusus Anak

Sasaran Program :

Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

- Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak
- Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap kasus-kasus anak
- Meningkatnya kualitas kelembagaan perlindungan anak

Indikator Program :

- Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar
- Persentase kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
- Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memiliki sarana pendukung sesuai standar

Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi



Sub Kegiatan :

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Provinsi

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja, pendanaan dan rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.3 berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju
Tahun 2026 Provinsi Gorontalo

(dapat dilihat pada lampiran)





BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan- pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan pencapaian tujuan.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Rencana Kerja DPPPA Provinsi Gorontalo 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						7.000.000.000,00							9.622.179.890,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.000.000.000,00							9.622.179.890,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						7.000.000.000,00							9.622.179.890,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						4.949.671.918,00						-	5.322.179.890,00	
		[Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan]	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	4.949.671.918,00	-	-	-	-	-	-	5.322.179.890,00	-
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	175.791.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	-	-	435.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	175.791.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			33 Orang	3.656.282.336,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-	-	3.667.179.890,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/Bulan	3.656.282.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		3.667.179.890,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			1 Dokumen	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Dokumen	30.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan 1 Laporan	918.446.482,00			-	-	-	-	620.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	918.446.482,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			4 Unit	169.152.100,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	169.152.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						1.500.000.000,00						-	2.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	3.03 75.24	0.23 69.95	0.73 71.12	1.03 71.94	1.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.200.000.000,00	-
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	-			1 Dokumen	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	Lembaga	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi				1 laporan	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	Lembaga		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	Lembaga		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	-	-	-	-	-	1.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.200.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lembaga		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	3.03 75.24	0.23 69.95	0.73 71.12	1.03 71.94	1.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.200.000.000,00	-
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi</i>	-			3 lembaga	1.500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Lembaga	-	1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi				3 Lembaga	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga		1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-			5 Lembaga	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				10 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						100.000.000,00						-	450.000.000,00	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000.000,00	-
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	-			1 lembaga	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				6 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			40 orang	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Lembaga		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						0,00						-	300.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak]	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	1	1	1	1	0,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-			10 Dokumen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	Lembag	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				10 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	Lembag		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-			10 Lembaga	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0005	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						0,00						-	100.000.000,00	
		[Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak]	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	100	100	100	100	0,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA</i>	-			1 Dokumen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						203.050.000,00						-	300.000.000,00	
		[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	66.60 75.40	59.82 75.75	60.95 75.70	62.08 75.65	203.050.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-			6 Dokumen	203.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	Lembaga	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				6 Kab/Kota Lembaga	203.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	Lembaga		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						247.278.082,00						-	950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 89.03	100 69.11	100 72.43	100 75.75	247.278.082,00	-	-	-	-	-	-	950.000.000,00	-
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	-			10 Orang	97.278.082,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Layanan	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				6 Kab/Kota Lembaga	97.278.082,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Layanan		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			35 Orang	150.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	-	-	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				35 Orang	150.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				35 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-			2 lembaga	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				6 Kab/Kota Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							7.000.000.000,00							9.622.179.890,00	

TABEL 2.4
TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI GORONTALO

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.982.161.470	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.856.321.470	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	373.769.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	373.769.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29 ORANG 32 dok	3.617.180.070	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29 ORANG 32 dok	3.507.180.070	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	190.563.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	190.563.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	279.950.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	279.950.900	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1unit	596.309.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1unit	596.309.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	665.610.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	649.770.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	258.779.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	258.779.500	

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ARG dalam APBD	-	1.892.225.791	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ARG dalam APBD	-	1.884.525.791	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	40 opd	248.320.950	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	40 opd	240.620.950	
2	Perberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	3 orgnssi	1.500.000.000	Perberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	3 orgnssi	1.500.000.000	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 PLP	143.904.841	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 PLP	143.904.841	
III	Program Perlindungan Perempuan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	453.383.000	Program Perlindungan Perempuan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	453.383.000	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	40 opd	190.328.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	40 opd	190.328.000	
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Layanan Tindak lanjut Pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	10 layanan	263.055.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Layanan Tindak lanjut Pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	10 layanan	263.055.000	
IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	110.000.000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	110.000.000	

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 lembg	110.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 lembg	110.000.000	
V	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	50.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	50.000.000	
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 dok	50.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 dok	50.000.000	
VI	Program Pemenuhan Hak Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	217.560.000	Program Pemenuhan Hak Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	217.560.000	
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan Dunia usaha	6 KAB/KOTA	217.560.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan Dunia usaha	6 KAB/KOTA	217.560.000	
VII	Program Perlindungan Khusus Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	523.887.580	Program Perlindungan Khusus Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	515.967.580	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30 PD	366.016.600	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30 PD	358.096.600	

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peresentase SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	6 KAB/KOTA	157.870.980	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peresentase SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	6 KAB/KOTA	157.870.980	
TOTAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.229.217.841	TOTAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9.087.757.841	

Tabel 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
				Satuan	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.000.000.000		
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.000.000.000		
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	4.949.671.918		
2.08.01.1.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100	%	175.791.000		
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	175.791.000	DAU	
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	Laporan	-	DAU	
2.08.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100	%	3.656.282.336		
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	29	Org	3.656.282.336	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
				Satuan	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8
2.08.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Laporan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	2	Dokumen	-		
2.08.01.1.02.05	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	2	Laporan	-		
2.08.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah					-		
2.08.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Laporan	-	DAU	
2.08.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-		
2.08.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Dokumen	-	DAU	
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Dokumen	-	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
				Satuan	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	6	orang	-	DAU	
2.08.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang sediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Paket	30.000.000	DAU	
2.08.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang				918.446.482		
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Laporan	-	DAU	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Laporan	918.446.482	DAU	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Laporan	-	DAU	
2.08.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				169.152.100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
				Satuan	Volume			
1	2	3	4	5		6	7	8
2.08.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Dibayarkan pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	4	Unit	169.152.100	DAU	
2.08.02	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG dalam APBD				1.500.000.000		
2.08.02.1.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					-		
2.08.02.1.01.05	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penyelenggaran PUG di tingskat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	kebijakan	-	DAU	
2.08.02.1.01.09	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Jumlah OPD (Provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	OPD	-		
2.08.02.1.01.11	Pendampingan Penyelenggaran PUG kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan penyelenggaraan PUG ditingkat Provinsi		1	kebijakan	-		
2.08.02.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi					1.500.000.000		
2.08.02.1.02.05	Advokasi pemberdayaan perempuan dibidang politik, atau hukum, atau sosial dan atau ekonomi Kewenangan provinsi	Jumlah Lembaga masyarakat dan pemerintah yang mendapatkan advokasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	3	lembaga	1.500.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
				Satuan	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8
2.08.02.1.02.08	Sosialisasi pemberdayaan perempuan dibidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekomoni Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	30	Orang	-		
2.08.02.1.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi					-		
2.08.02.1.03.08	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan BINTEK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	0		-	DAU	
2.08.02.1.03.10	Pendampingan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	5	lembaga	-		
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan					100.000.000		
2.08.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					-		
2.08.03.1.01.04	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan Pencegahan KtP kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	30	Orang	-	DAU	
2.08.03.1.01.07	Advokasi dan sosilisasi pencegahann KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakkan dan pemangku kepentingan yang mendapat Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat Provinsi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Orang	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
				Satuan	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8
2.08.03.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		
2.08.03.1.02.05	Layanan Pendampingan korban bagi PerempuanKorban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat daerah provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	20	orang	-	DAU	
2.08.03.1.02.08	Layanan pengaduan atau Penjangkauan bagi perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah Provinsi dan Lintas daerah	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan pengaduan atau penjangkauan korban tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	40	Orang	100.000.000		
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					-		
2.08.03.1.03.05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan Bimtek	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	20	Orang	-		
2.08.03.1.03.09	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Provinsi yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Lembaga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	2	lembaga	-		
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					-		
2.08.04.1.01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil Kebijakan dan Pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
				Satuan	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8
2.08.04.1.01.07	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil Kebijakan dan Pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	10	Orang	-		
2.08.04.1.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsiningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					-		
2.08.04.1.02.08	Pendampingan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat pendampingan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	10	Lembaga	-	DAU	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				-		
2.08.05.1.01	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					-		
2.08.05.1.01.03	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui SIMPONI PPA	Jumlah Dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekrasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1	Dokumen	-	DAU	
2.08.05.1.01.05	Penyediaan, Penyajian, dan pemanfaatan data gender dan anak Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1	Data	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
				Satuan	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		62,08	indeks	203.050.000		
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		75,65	indeks			
2.08.06.1.01	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					203.050.000		
2.08.06.1.01.07	Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabipaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan Hak Anak		6	Kab/Kota	203.050.000	DAU	
2.08.06.1.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
2.08.06.1.02.06	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		6	Kegiatan	-		
2.08.06.1.02.06	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidupanak kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi		2	Dokumen	-		
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak					247.278.082		
2.08.07.1.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					247.278.082		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
				Satuan	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8
2.08.07.1.01.07	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan Provinsi	Jumlah Pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Provinsi, masyarakat, serta Kab/kota		6	Kab/Kota	97.278.082	DAU	
2.08.07.1.01.08	Layanan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah Ka/kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		35	org	150.000.000		
2.08.07.1.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					-		
2.08.07.1.03.06	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak Perlindungan yang Memerlukan Khusus		4	Laporan	-	DAU	
	Total				-	7.000.000.000	-	-

Tabel 4.1
T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Satuan	Volume				Rp.	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.087.757.841				7.000.000.000		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9.087.757.841				7.000.000.000		
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	5.856.321.470			100	%	4.949.671.918
2.08.01.1.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100	%	373.769.000			100	%	175.791.000
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32	Dokumen	343.769.000	DAU		32	Dokumen	175.791.000
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	Laporan	30.000.000	DAU		4	Laporan	-
2.08.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksaasn Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	3.507.180.070			100	%	3.656.282.336
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	29	Org	3.507.180.070	DAU		29	Org	3.656.282.336
2.08.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	%	190.563.000			100	%	-
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Tahun	190.563.000	DAU		1	Tahun	-
2.08.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100	%	279.950.900			100	%	30.000.000
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Paket	-	DAU		1	Paket	30.000.000
2.08.01.1.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Paket	108.257.000	DAU		1	Paket	-
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Dokumen	15.000.000	DAU		1	Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Satuan	Volume				Rp.	Satuan	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Dokumen	156.693.900	DAU		1	Dokumen	-
2.08.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		100	%	596.309.000			100	%	-
2.08.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	4	Unit	596.309.000	DAU		4	Unit	-
2.08.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang		100	%	649.770.000			100	%	918.446.482
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,		Dokumen	132.000.000	DAU			Dokumen	-
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,			13.680.000	DAU				-
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,			504.090.000	DAU				918.446.482,00
2.08.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100	%	258.779.500			100	%	169.152.100
2.08.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Dibayarkan pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Unit	168.803.500	DAU		1	Unit	169.152.100
2.08.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa,	1	Laporan	89.976.000	DAU		1	Laporan	-
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG dalam APBD				1.884.525.791					1.500.000.000
2.08.02.1.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas				240.620.950					-
2.08.02.1.01.07	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		4	SKPD	240.620.950	DAU		4	SKPD	-
2.08.02.1.02	Kegiatan Perberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase (%) perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi				1.500.000.000					1.500.000.000
2.08.02.1.02.04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		4	Kegiatan	1.500.000.000	DAU		4	Kegiatan	1.500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
				Satuan	Volume			Satuan	Volume	
1	2	3	4	5		6	7	8		10
2.08.02.1.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas				143.904.841				-
2.08.02.1.03.04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Yang Mendapat Advokasi Dan		4	Kegiatan	143.904.841	DAU	4	Kegiatan	-
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan					453.383.000				100.000.000
2.08.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					190.328.000				-
2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		4	SKPD	190.328.000	DAU	4	SKPD	-
2.08.03.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					263.055.000				100.000.000
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Layanan	263.055.000	DAU		Layanan	-
2.08.03.1.02.08	Layanan pengaduan atau penjangkauan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Layanan	263.055.000	DAU	40	Layanan	100.000.000,00
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					110.000.000				-
2.08.04.1.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsiningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					110.000.000				-
2.08.04.1.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		4	Lembaga	110.000.000	DAU	4	Lembaga	-
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				50.000.000				-
2.08.05.1.01	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					50.000.000				-
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		4	Dokumen	50.000.000	DAU	4	Dokumen	-
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				217.560.000				203.050.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Satuan	Volume		Rp.		Satuan	Volume	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.08.06.1.01	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					217.560.000					-
2.08.06.1.01.03	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		4	Organisasi	217.560.000	DAU				
2.08.06.1.01.07	Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		-		-	DAU	6	kab/kota		203.050.000,00
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak					515.967.580					247.278.082
2.08.07.1.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					358.096.600					97.278.082
2.08.07.1.01.03	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provins		4	Organisasi	358.096.600	DAU		4	Organisasi	-
2.08.07.1.01.07	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota		-		-	DAU	6	kab/kota		97.278.082,00
2.08.07.1.02	Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi					157.870.980					150.000.000
2.08.07.1.02.09	Layanan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah		-		-	DAU	35	orang		150.000.000,00
2.08.07.1.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					157.870.980					-
2.08.07.1.03.06	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak Perlindungan yang Memerlukan Khusus		4	Laporan	157.870.980	DAU		4	Laporan	-
	Total				-	9.087.757.841	-	-		-	7.000.000.000

[illegible]

Kode	Uraian Kegiatan dan Pembahasan Detail dari Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahunan 2024	Target Kinerja Capaian Program Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Indikator Kinerja Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan (Rincai Pemerintah Daerah Tahun 2024)						Keterangan		
			K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.				
			K	No	K	No	K	No	K	No	K	No	K	No	K	No	K	No			
2.06.07.1.02.01	Pengabdian Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	terdapat Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Memerlukan layanan perlindungan	10	anak	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	terdapat Laporan Hasil rapat koordinasi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	10	bp	400.000.000	-	1	120.202.000	1	112.497.700	100,00	93,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06.07.1.02.03	Pengembangan Kemitraan Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	terdapat Dokumen Komunikasi Internal dan Eksternal (PHE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	10	duk	400.000.000	-	1	229.400.700	1	225.898.400	100,00	98,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06.07.1.02.04	Pengabdian Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	terdapat Dokumen Hasil Pengabdian yang Anak Layanan Prorotai Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	10	duk	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06.07.1.02	Pengabdian Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	terdapat Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai			1.268.000.000	-	-	38.164.300	38.163.200	93,92	-	93,78	63.750.000	-	63.750.000	-	-	-	-	-	100
2.06.07.1.03.01	Pengabdian Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	terdapat Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	10	bp	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06.07.1.03.02	Pengabdian Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	terdapat Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	10	duk	400.000.000	-	1	38.144.500	1	36.760.200	100,00	93,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06.07.1.03.03	Pengabdian Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	terdapat Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Prorotai	10	duk	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2	duk	63.750.000	-	2	63.750.000	-	-	-
Total					62.205.000.000	-	-	7.666.726.007	7.203.824.936	93	93,80	6.800.317.841	-	6.800.317.841	-	6.800.317.841	-	-	-	-	100